

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan dimulai dengan kegiatan orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD.
- c. Tahapan penetapan Renstra SKPD.

Renstra BPBD Kota Yogyakarta disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Yogyakarta dengan memperhatikan indikator kinerja Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra BPBD DIY, yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Pelaksanaan Renstra BPBD Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Yogyakarta sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja.

## 1.2. Landasan Hukum

Kedudukan dan dasar hukum kegiatan penyusunan Renstra BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2); dan
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

- a. Sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit kerja dilingkungan BPBD Kota Yogyakarta dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan.
- b. Sebagai kerangka dasar bagi BPBD Kota Yogyakarta dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur.
- c. Sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja BPBD Kota Yogyakarta atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur.

#### **1.3.2. Tujuan**

- a. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
- b. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
- c. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.
- d. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

### **BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

### **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

### **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

### **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

### **BAB VIII Penutup**

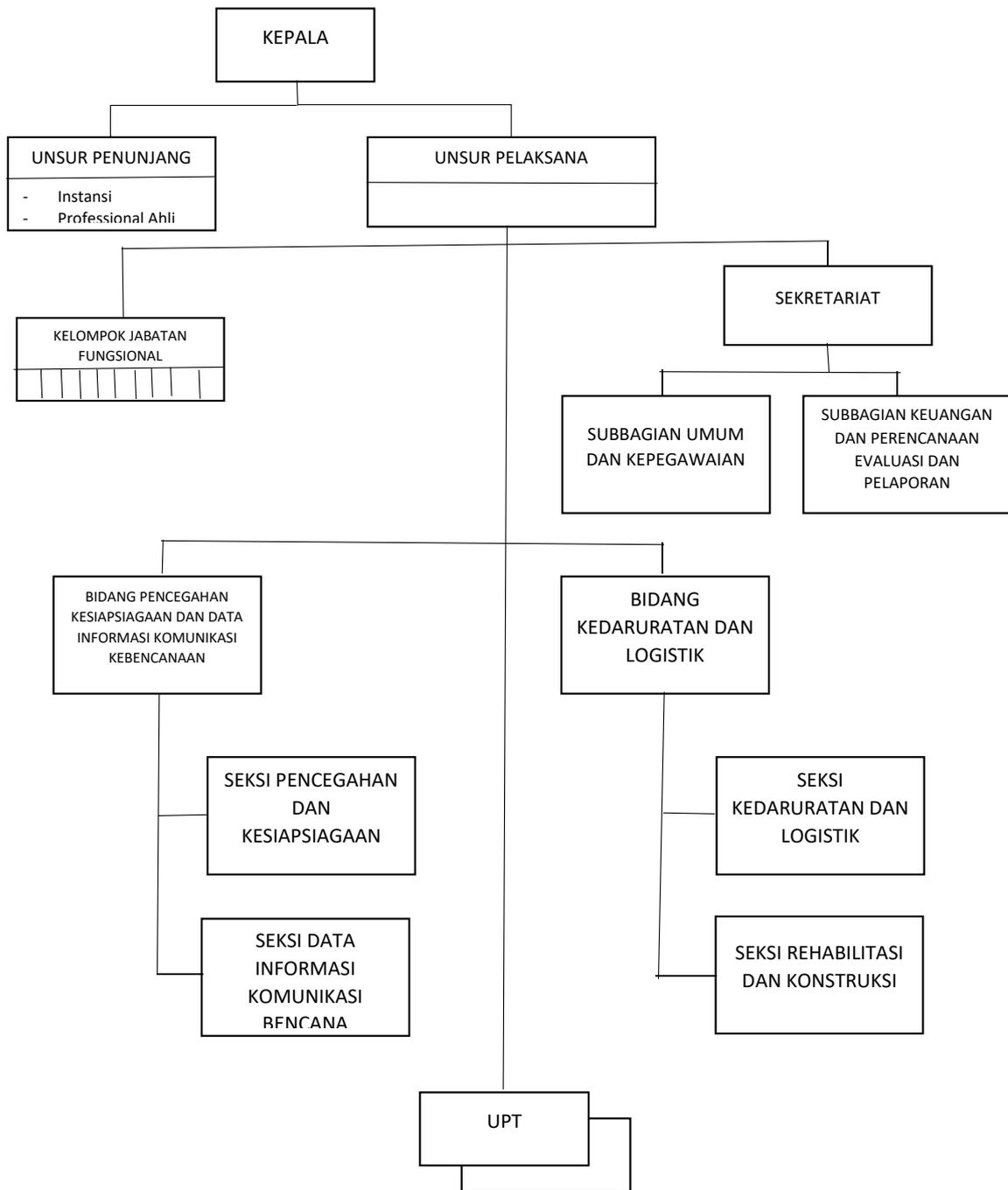
## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas dan Fungsi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta jo. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah**



Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 menetapkan bahwa Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPBD mempunyai fungsi:

- 1) pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan sub urusan bencana;
- 2) pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- 3) pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
- 4) pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 5) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- 6) pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
- 7) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
- 8) pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- 9) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, system pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
- 10) pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- 11) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan.

## 2.2. Sumber Daya

### A. Keadaan Pegawai

Jumlah personil yang ada per Desember 2021 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri dari 16 orang ASN dan 5 orang CASN. Untuk rincian personil ASN dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1. ASN BPBD Berdasarkan Jabatan dan Golongan**

No	Kategori	Golongan/Ruang								
		II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/a
1.	Eselon II b									
2.	Eselon II a									1
3.	Eselon III a							2		
4.	Eselon III b								1	
5.	Esselon IV a					2	3	1		
6.	Fungsional Umum	5	2	2	1		1			

No	Kategori	Golongan/Ruang								
		II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/a
	Jumlah	5	2	2	1	2	4	3	1	1

**Tabel 2.2. ASN BPBD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan**

No	Kategori	Jenis Kelamin		Pendidikan				
		P	L	SMP	SMA	D3	S1/ D.IV	S2
1.	Eselon II b							
2.	Eselon II a	1						1
3.	Eselon III a	2						2
4.	Eselon III b	1						1
5.	Esselon IV a	4	2				3	3
6.	Fungsional Umum	5	6		2	5	4	
	Jumlah	14	8	0	2	5	7	7

Dibandingkan dengan Formasi Hasil Analisis Jabatan kebutuhan ASN dan Formasi Eksisting ASN di BPBD, masih mengalami kekurangan ASN sejumlah 50 personil. Gap antara jumlah personil BPBD berdasarkan Hasil Analisis Jabatan dengan Eksisting tergambar pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3. Rekapitulasi Pemenuhan Anjab Tahun 2021**

No.	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai sesuai Anjab	Pemenuhan Anjab
1	<b>Kepala</b>		
2	<b>Kepala Pelaksana</b>	1	1
3	<b>Sekretaris</b>	1	1
4	<b>Keapala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>	1	1
5	Analisis Tata Usaha	1	-
6	Pengelola Teknologi Informasi	1	-
7	Pengadministrasi Umum	1	-
8	Pengadministrasi Kepegawaian	1	-
9	Pengadministrasi Sarana Prasarana	1	-
10	Pramu Bakti	1	-
11	<b>Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan</b>	1	1
12	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	-

No.	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai sesuai Anjab	Pemenuhan Anjab
13	Bendahara	1	1
14	Pengolah Data Laporan Kas	1	1
15	Verifikator Keuangan	2	-
16	Pengelola Akuntansi	1	1
17	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	-
18	<b>Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Dan Data Informasi Komunikasi Bencana</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
19	<b>Sub Koordinator Pencegahan Dan Kesiapsiagaan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
20	Analisis Mitigasi Bencana	1	1
21	Penyuluh Bencana	1	-
22	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	1	-
23	Pranata Bencana	12	2
24	<b>Sub Koordinator Data Dan Informasi Komunikasi Bencana</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
25	Analisis Data dan Informasi	1	-
26	Pengolah Informasi dan Komunikasi	1	-
27	Pranata Bencana	12	2
28	<b>Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Dan Rehabilitasi Rekonstruksi</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
29	<b>Sub Koordinator Kedaruratan Dan Logistik</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
30	Analisis Bencana	1	-
31	Pengelola Logistik	1	-
32	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	1	-
33	Pranata Bencana	12	1
34	<b>Sub Koordinator Rehabilitasi Dan Rekonstruksi</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
35	Analisis Bencana	1	1
36	Analisis Kerusakan Fisik dan Bangunan	1	-
37	Konselor	1	-

No.	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai sesuai Anjab	Pemenuhan Anjab
38	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>71</b>	<b>21</b>

Dengan adanya keterbatasan personil ASN dan CASN yang ada di BPBD, maka pada tahun 2021, BPBD Kota Yogyakarta juga dibantu oleh 74 orang tenaga teknis perorangan, yang penempatan masing-masing tenaga teknis sebagai Tenaga Teknis Administrasi 3 orang, Tenaga Teknis Pendamping Kesiapsiagaan 2 orang, Tenaga Teknis Pusdalops PB Admin 8 orang, Tenaga Teknis Pusdalops PB 4 orang, Tenaga Teknis Pendamping PB 15 orang, Tenaga Teknis Administrasi Darlog 1 orang, Tenaga Teknis Administrasi Rehab Rekon 1 orang, Tenaga Teknis Pengemudi Mobil Jenazah 16 orang dan Tenaga Teknis Tim Reaksi Cepat 24 orang.

#### B. Keadaan Sarana dan Prasarana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta menempati gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta, yang berlokasi di Jalan Gambiran Nomor 26, Pandeyan, Kotagede, Kota Yogyakarta dengan luas bangunan 518 m<sup>2</sup> dan dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada:

**Tabel 2.4. Kelengkapan Sarana dan Prasarana BPBD**

NO	NAMA BARANG	KONDISI (B/BR/RB)	JUMLAH BARANG	NILAI BARANG (RP.)
1	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	Baik	61	43,800,000
2	Alat Penghancur Kertas	Baik	1	4,375,000
3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	2	6,000,000
4	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1	3,415,000
5	Portable Generating Set	Baik	15	148,830,000
6	Pompa Air	Baik	15	81,675,000
7	Gergaji Chain Saw	Baik	20	117,727,500
8	Papan Pengumuman	Baik	643	96,701,990
9	P.C Unit	Baik	2	12,540,000
10	Kipas Angin	Baik	2	10,200,000
11	Handy Talky (HT)	Baik	93	128,386,500
12	Tali Kamantel Static	Baik	2	6,900,000
13	Tali Kamantel Dinamic	Baik	3	4,455,000
14	Seat Harness	Baik	3	1,402,500

NO	NAMA BARANG	KONDISI (B/BR/RB)	JUMLAH BARANG	NILAI BARANG (RP.)
15	Prusik	Baik	2	1,468,500
16	Pulley	Baik	3	1,943,700
17	Descender Figure og Eight	Baik	6	1,650,000
18	Carabiner Non Screw	Baik	15	2,326,500
19	Webbing	Baik	1	990,000
20	Mesin Pel/Poles	Baik	22	55,000,000
21	Helmet	Baik	9	1,881,000
22	Back Pack/Ransel	Baik	3	330,000
23	Tandu	Baik	15	22,500,000
24	Sarung Tangan Pelindung (Alat Pelindung Lainnya)	Baik	9	1,485,000
25	Kursi Putar	Baik	3	2,800,000
26	Lemari Kayu	Baik	1	6,800,000
27	Meja Kerja Kayu	Baik	6	16,500,000
28	Meja Rapat	Baik	5	18,880,000
29	Kursi Rapat	Baik	10	13,000,000
30	Kursi Biasa	Baik	7	3,150,000
31	Sepeda Motor Roda Tiga	Baik	15	442,500,000
32	Rak Besi	Baik	12	53,755,044
33	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Baik	1	227,994,325
34	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	3	2,790,511,278
35	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	1	421,583,407
	<b>JUMLAH</b>		<b>1,012</b>	<b>4,753,457,244</b>

Dengan bertambahnya kegiatan dan personil BPBD akibat perubahan struktur organisasi BPBD yang semula adalah Kantor menjadi Badan, kebutuhan akan ruang kerja dan bangunan kantor juga semakin bertambah. Selain kebutuhan ruang kerja dan bangunan kantor, beberapa sarana dan prasarana kantor juga diajukan dalam RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) BPBD pada tahun 2021, yakni:

**Tabel 2.5. Usulan RKBMD BPBD Tahun 2021**

No	Nama Barang	Usulan RKBMD		Cara Pemenuhan	Keterangan
		Jumlah	Satuan		
1	Laptop	1	unit	Pembelian	Untuk Kepala BPBD ( menyesuaikan rencana restrukturisasi organisasi BPBD Tahun 2021)
2	Printer Laser Jet	2	unit	Pembelian	Penambahan printer untuk menyesuaikan rencana restrukturisasi organisasi BPBD Tahun 2021 / penambahan bidang

No	Nama Barang	Usulan RKBMD		Cara Pemenuhan	Keterangan
		Jumlah	Satuan		
3	Kursi Kerja putar tangan	9	unit	Pembelian	Kursi kerja untuk pejabat struktural (menyesuaikan rencana restrukturisasi organisasi BPBD Tahun 2021)
4	Kursi Kerja	10	unit	Pembelian	Penambahan kursi kerja untukantisipasi penambahan pegawai (menyesuaikan rencana restrukturisasi organisasi BPBD Tahun 2021)
5	Sofa Ruang Tamu	1	set	Pembelian	Untuk ruang receptionist
6	Meja Kerja 1 biro	5	unit	Pembelian	Penambahan meja kerja untuk pejabat struktural (menyesuaikan rencana restrukturisasi organisasi BPBD Tahun 2021)
7	Pemeliharaan bangunan kantor	2	unit	Pemeliharaan	Pemeliharaan gedung kantor
8	Minibus	1	unit	Usulan ke BPKAD	1 unit Sebagai pengganti Mobil Kijang yang sudah tua
9	Kendaraan Roda 2	3	unit	Usulan ke BPKAD	2 unit kendaraan kondisi sudah tua sehingga mohon penggantian , 1 unit untuk petugas caraka ,jadi total kebutuhan 3 (2 penggantian + 1 usulan baru)
10	AC 2 PK	2	unit	Usulan ke BPKAD	Untuk ruang receptionist dan sekretariat

### C. *Early Warning System*

*Early Warning System* atau Sistem Peringatan Dini Bencana merupakan elemen yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Peringatan dini bencana sebagai salah satu bagian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk mengambil tindakan dan respon cepat dan tepat yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak bencana tersebut. Sistem peringatan dini bencana digunakan baik pada saat kejadian bencana maupun pra bencana. Pada kondisi pra bencana, sistem peringatan dini berfungsi sebagai tindakan antisipatif sebelum kejadian bencana.

Dengan menilik dan mempertimbangkan risiko bencana yang ada di Kota Yogyakarta, BPBD Kota Yogyakarta mengelola beberapa sistem peringatan dini, yaitu:

### 1) *Early Warning System (EWS) Gempa Bumi dan Tsunami BMKG*

*EWS Gempa Bumi dan Tsunami* ini merupakan alat *EWS* yang dipinjam pakaian oleh BMKG kepada BPBD Kota Yogyakarta berupa *Warning Receiver System - New Generation (WRS NewGen)*, merupakan sistem *Real-Time* penerima informasi gempa bumi dan peringatan dini *tsunami* dengan menggunakan perangkat *recommended hardware* berupa *smart display* dan terkoneksi secara *online* dengan sistem diseminasi di Pusat InaTEWS-BMKG.

Keunggulan dari alat *WRS NewGen* ini adanya informasi gempa bumi *real-time* yang disertai visualisasi penjalaran gelombang P dan S (gelombang merusak), dan hal ini merupakan terobosan baru BMKG dalam penyebaran informasi gempa bumi dan peringatan dini *tsunami* yang dapat memberikan informasi secara cepat. Sebagai tambahan informasi *smart display* ini di support dengan *operating system Linux*, aplikasi *WRS client*, dan *browser* untuk membuka informasi seperti *google chrome* dan *Mozilla Firefox*.

Adapun informasi fitur informasi yang ditampilkan seperti:

- Bunyi *alarm* (saat menerima informasi atau peringatan);
- Informasi gempa bumi *real-time* dari BMKG secara otomatis disertai dengan visualisasi penjalaran gelombang P dan S (gelombang merusak);
- Informasi gempa bumi M di atas 5, peringatan dini *tsunami* dan gempa bumi dirasakan yang dikirim sesuai dengan SOP BMKG disertai *Pop Up window* dalam bentuk teks dan peta;
- Data historis informasi gempa bumi *real time* selama 20 hari terakhir, historis informasi gempa bumi M di atas 5, historis peringatan dini *tsunami* dan historis gempa dirasakan;
- *Shake Map* (peta guncangan);
- Berbasis *Cloud*;
- Info skala MMI; dan
- *Glossary*.

### 2) *EWS Banjir*

*Sistem* prakiraan dan peringatan dini banjir merupakan salah satu pendekatan non struktur untuk pengendalian banjir. Sistem prakiraan dan peringatan dini banjir digunakan dalam rangka untuk meminimalisasi dampak risiko bencana banjir. Sistem yang telah digunakan saat ini

berdasarkan informasi muka air yang terjadi di Sungai Boyong (POS Pantauan Ngentak) dan diinformasikan melalui komunikasi radio ke PUSDALOPS PB Kota Yogyakarta. Selanjutnya PUSDALOPS memberikan peringatan dini ke masyarakat bantaran sungai melalui *EWS* yang berada di setiap sungai agar masyarakat yang berada di bantaran sungai bisa melakukan evakuasi mandiri terlebih dahulu sebelum sungai mengalami kenaikan.

Saat ini BPBD Kota Yogyakarta memiliki 16 *EWS* yang terpasang di 3 bantaran sungai wilayah kota Yogyakarta.

- **Sungai Code**

No	Lokasi	Lotitude	Longitude
1	Cokrokusuman	7°46'48.7"S	110°22'11"E
2	Jogoyudan	7°47'10.37"S	110°22'2.35"E
3	Ledok Macanan	7°47'27.58"S	110°22'5.04"E
4	Juminahan	7°47'47.81"S	110°22'12.88"E
5	Bintaran	07°48'13.8"S	110°22'19.3"E
6	Surokarsan	7°48'18.47"S	110°22'27.79"E
7	Keparakan	7°48'31.87"S	110°22'26.37"E

- **Sungai Gajah Wong**

No	Lokasi	Lotitude	Longitude
1	Warungboto	7°48'41.22"S	110°23'39.73"E
2	Gambiran	7°49'15.49"S	110°23'38.30"E
3	Ponggalan	7°49'42.32"S	110°22'12.88"E
4	Pandeyan	7°48'55.0"S	110°23'31.8"E
5	Darakan	7°49'33.7"S	110°23'37.2"E

- **Sungai Winongo**

No	Lokasi	Lotitude	Longitude
1	Tejo Kusuman	7°48'25.59"S	110°21'14.32"E
2	Pingit	7°46'54.6"S	110°21'27.4"E
3	Serangan	7°48'11.5"S	110°21'15.8"E
4	Notoyudan	-	-

3) *EWS* Telemetry

Salah satu usaha pencegahan dampak dari banjir adalah dengan

menerapkan sistem monitoring level air sungai secara remote, yang bertujuan untuk mengetahui perubahan ketinggian air sungai setiap saat dari jarak jauh. Untuk dapat menerapkan suatu sistem pemantauan level air sungai dari jarak jauh, diperlukan suatu sistem telemetri (pengiriman data jarak jauh) yang sesuai, handal dan akurat, sehingga data ketinggian air sungai dapat dikirimkan secara akurat dan realtime serta dapat diamati di PUSDALOPS PB Kota Yogyakarta.

Telemetri adalah suatu metode pengukuran jarak jauh yang dilakukan oleh karena tidak memungkinkannya kondisi pengukuran langsung. Data pengukuran tersebut disimpan pada suatu perangkat penyimpan (data *logger*) yang dapat menampung jumlah data banyak. Peralatan tersebut dikontrol penuh oleh sebuah mikrokontroler sebagai pengendali sistem. Telemetri ini dipasang di Sungai Boyong/Pos Pantauan Ngentak masih dalam proses perbaikan.

### **2.3. Capaian-capaian Penting**

Dalam kurun waktu tahun 2017 – 2022, ada 2 bencana yang ditangani oleh BPBD Kota Yogyakarta, yaitu:

#### **1) Siklon Cempaka**

Siklon Cempaka di Kota Yogyakarta terjadi pada bulan November tahun 2017, yang mengakibatkan pohon tumbang/robok di 13 lokasi, talud longsor di 4 lokasi dan tanah longsor/bergerak di 14 lokasi.

**Tabel 2.6. Data Kejadian Bencana Siklon Cempaka  
Tanggal 28 – 30 November 2017**

No	Tanggal	KEC	Kelurahan	Lokasi / Alamat	Pemilik	Jenis Kejadian	Terdampak	Volume	Jiwa dievakuasi		
									Jmh	Ket. ( S/T)	
1	28 - 30/November/2 017	Tegalrejo	Kricak	Bangunrejo RT.45/RW.10, Kricak, Tegalrejo		Rumpun bambu rubuh	menutup akses Sungai Buntung				
2		Tegalrejo	Kricak	Jatimulyo RT.06/RW.01, Kricak, Tegalrejo		Rumpun bambu rubuh	Menutup aliran sungai				
3		Tegalrejo	Kricak	Makam bangunrejo 2 , RT 42 RW 10 Bangunrejo Kricak Tegalrejo		Pohon Tumbang		diameter 50 cm			
4		Tegalrejo	Karangwaru	Jl. Gotong Royong 2 (SMU MUH. 1)	SMU MUH. 1 yk	Pohon Tumbang / Preh	menimpa pagar sekolah & mengganggu akses jalan		diameter = 100 cm; t = 15 m		
5		Tegalrejo	Tegalrejo	Tompeyan No. 156 RT. 03/RW.01, Tegalrejo		Talud Longsor	8 rumah		p = 10 m; l = 35 m		
6		Tegalrejo	Tegalrejo	Sudagaran RT 40/RW 11, Tegalrejo		Talud Longsor	1 rumah		p = 10 m; l = 2,5 m; t = 2,5 m	3 KK, 8 jiwa	
7		Jetis	Bumijo	badran RT 47 RW 11 Bumijo Jetis	maryani	Tanah Longsor	kamar rumah warga				
8		Jetis		RT 51 RW 11		Talud Longsor	menutup akses jalan		T=20m		
9		Jetis		Jl. AMI, Sangaji No. 41, Cokroliningratan, Jetis, Yogyakarta (Harian Jogja)		Pohon Tumbang	menimpa rumah		diameter = 15 cm; t = 3 m		
10		Gondokusuman		Jl. Kahar Muzakir no. 2		pohon tumbang / waru	mengganggu akses jalan				
11		Danurejan	Suryatmajan	Gemblakan Atas RT.09/RW.03 DN I/330, Jl. Mataram, Suryatmajan, Danurejan (belakang penjahit "waspada")	sumardi (65th)	Tanah Longsor	1 rumah		p = 10 m; t = 2,5 m; l = 2,5 m	3kk 8jw	
12		Danurejan	Suryatmajan	Jl. Maliboro No. 16 Yogyakarta		Pohon Tumbang / beringin	Kantor Keparthan DIY		diameter = 1,5 m; t = 30 m		
13		Danurejan	Tegalpanggung	Juminahan rt.56, 57 rw.14 tegalpanggung, danurejan		Tanah Longsor	32 KK		: t = 15 m; p = 32 m	121 Jiwa	
14		Gedongtengen	Prenggokusuman	Jlagran GT II / 120 RT 01 RW 01 Kel. Prenggokusuman, Kec. Gedong Tengen	Barjono	Tanah Longsor	rumah warga		t = 10 m; l = 5 m; p = 7 m	43 jiwa (3 MD)	
15		Gedongtengen	Prenggokusuman	RT 11 RW 03 Jlagran GT 2/308		Tanah Bengkah	5 KK 17 jw				
16		Gedongtengen	Prenggokusuman	RT 74 & 78 RW 22 Notoyudan		Tanah Bergerak	RT 74 (7 KK 24 jw) & RT 78 (3KK 8 jw)				
17		Wirobrajan	Pakuncen	Gampingan RT 47 RW 10 Kel. Pakuncen Kec. Wirobrajan		Talud Longsor			t = 7 m; l = 3 m; p = 30 m	2KK 6jw	
18		Mantrijeron	Gedongkiwo	RW 9 RT 43 Gedongkiwo		Tanah Longsor	4 rumah		P=15m, T=10m	4 kk	
19		Kraton	Patehan	Suryopuri, Nagan Kulon, Kel. Patehan RW 02, Kec. Kraton		Pohon Tumbang					
20		Kraton		Taman, RT 31 RW 08		Pohon Tumbang / beringin	Ruang Terbuka Hijau RW 8		d = 25 cm , T = 8m		
21		Kraton		suryoputran PB 3 / 84 RT 24 RW 8	aris sukmedi	Pohon Tumbang / alpukat	Tembok Pagar rumah warga		d = 40cm , T=10m		
22		Kraton		Nagan Kulon RW 2	arya rahman	Pohon Tumbang / sawo kecil	menimpa rumah		d = 70cm , T = 15 m		
23		Umbulharjo	Pandeyan	Gambiran UH 5/272 A RT 51 RW 13 Pandeyan Umbulharjo	M. Jumali	Tanah Longsor	menimpa 1 rumah		t = 7 m; l = 3 m; p = 10 m	2 KK 9jw	
24		Umbulharjo	Pandeyan	Gambiran UH 5/229 RT 50 RW 13 Pandeyan Umbulharjo	M. Suyono	Tanah Longsor	teras rumah warga		L=2m , T=7m	1kk 6jw	
25		Umbulharjo	Sorosutan	Jl. Lowanu		Pohon Tumbang	menutup akses jalan		diameter = 0,6 m; t = 10 m		
26		Kotagede	Prenggan	Karang Rt 21 Rw 05 Prenggan		Tanah Longsor	sd karangmulyo		P: 50 m, T: 17 m, L: 15 m	6 jiwa	
27		Kotagede	Prenggan	darakan Rt 57 Rw 13		Tanah Longsor	6 rumah terancam longsor		P 10 m, T 8 m	6 jiwa	
28		Kotagede	Prenggan	Sambirejo Rt 06 Rw 01		Tanah Longsor	kandang hewan dan drum oli		P 5 m, T 8 m		
29		Kotagede	Purbayan	Cokroyudan RT 39/RW 09, Purbayan, Kotagede		Tanah Longsor	menutup akses jalan		p = 10 m; t = 5 m	2 jiwa	
30		Kotagede	Purbayan	Ledok Ndalem RT 42/RW 10 Purbayan		Pohon Tumbang	menutup akses jalan		diameter = 40 cm; t = 12 m		
31		Tegalrejo	Kricak	SD BANGUNREJO 2 RT 53 RW 13 kel.kricak kec.tegalrejo	SD Bangunrejo 2	Tanah longsor	SD Bangunrejo 2		p = 12 m; t = 15 m; l = 10 m		

## 2) Corona Virus Disease 19

*Corona Virus Disease 19* atau *Covid-19* masuk di Kota Yogyakarta pada pertengahan tahun 2019. Selama tahun 2019 – 2021, jumlah pemulian jenazah dengan protokol kesehatan *Covid-19* yang dilaksanakan oleh BPBD adalah:

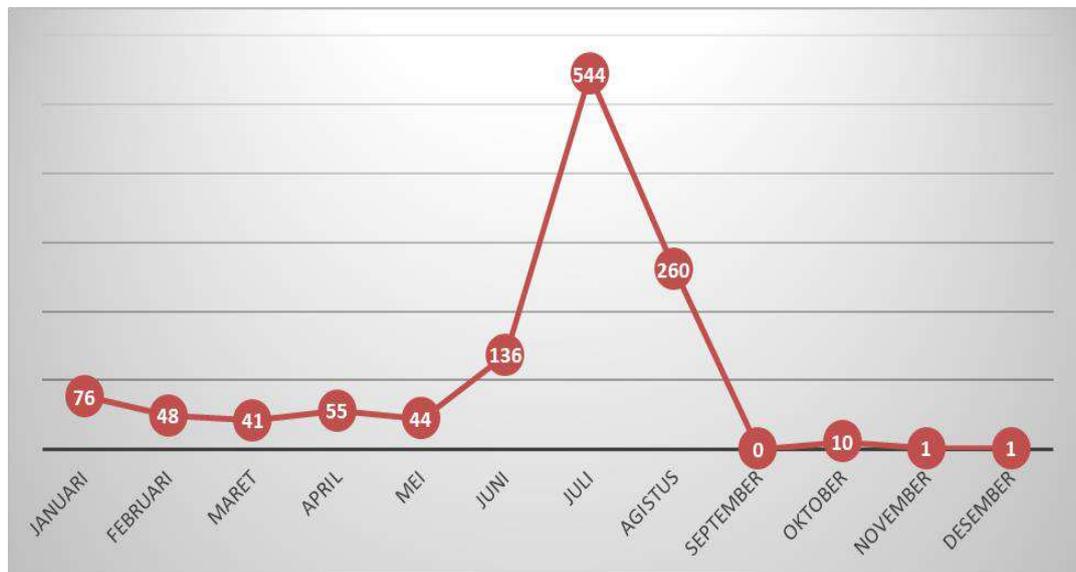
### A. Tahun 2019

N o	Bulan	Pemaka- man	Penjem- putan	Pengan- taran
1	Agustus 2020	5	0	0
2	September 2020	25	0	0
3	Oktober 2020	15	2	1
4	November 2020	22	0	0
5	Desember 2020	65	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>132</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

## B. Tahun 2021

Pada tahun 2021, terdata sebanyak 1.216 layanan pemulian jenazah prokes Covid-19 yang dilakukan oleh BPBD. Rata-rata pemulian jenazah yang dilaksanakan oleh BPBD setiap bulan ada 52 layanan dengan lonjakan kasus pada bulan Juni – Agustus dan penurunan di bulan September – Desember. Secara lebih lengkap layanan pemulian jenazah prokes Covid-19 oleh BPBD digambarkan pada grafik dibawah ini.

**Gambar 2.2. Grafik Layanan Pemulian Jenazah Covid-19 per Bulan Tahun 2021**



Selain, pemulian jenazah dengan prokes *Covid-19*, penanganan *Covid-19* yang dilaksanakan BPBD Kota Yogyakarta, juga meliputi kegiatan:

- ✓ Pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan *Covid-19* pada tahun 2020; dan
- ✓ Pelaksanaan dekontaminasi bekerjasama dengan PMI Kota Yogyakarta, antara lain dilaksanakan pada area shelter pasien *Covid-19*, area balaikota, dan area pelaksanaan vaksin massal. Sedangkan untuk kegiatan dekontaminasi di wilayah Kemantren, dilaksanakan oleh relawan dengan fasilitas sarana dan prasarana dekontaminasi semisal bahan *sanitizer* dan alat semprot disediakan oleh BPBD.

## 2.4. Capaian Program Prioritas

Dalam Renstra BPBD periode tahun 2017 – 2022, tolok ukur capaian sasaran BPBD berupa meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu indikator: Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana. Penjelasan hubungan antara sasaran, indikator, formula indikator dan target kinerja Renstra BPBD tahun 2017 – 2022 lebih jelas digambarkan dalam table berikut ini:

**Tabel 2.7. Indikator Sasaran dan Target Tahun 2017 – 2022**

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Target per Tahun					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Meningkat	Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	(50% kampung tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi dan rekonstruksi) dikali 100	58.50	61.00	75.82	84.02	88.46	92.90

Penetapan indikator sasaran strategis BPBD berupa Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana merupakan gambaran core bisnis BPBD sebagai instansi yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana. Dengan kata lain, BPBD merupakan instansi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta. Penyelenggaraan penanggulangan bencana sendiri dimaknai sebagai serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Terdapat 4 (empat) aspek yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu aspek pemulihan, aspek pencegahan dan mitigasi, aspek tanggap darurat dan aspek kesiapsiagaan. Ke-empat aspek ini saling terhubung sebagaimana ditampilkan dalam gambar dibawah ini.

**Gambar 2.3. Empat Aspek Penanggulangan Bencana**



Empat aspek penanggulangan bencana inilah yang kemudian diintegrasikan kedalam indikator sasaran dan indikator program BPBD Kota Yogyakarta. Indikator sasaran berupa Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana diukur dari pemenuhan unsur 50% pembentukan Kampung Tangguh Bencana (KTB) sebagai aspek pencegahan dan mitigasi dan kesiapsiagaan melalui komunitas, 30% dari pelaksanaan evakuasi korban bencana sebagai aspek tanggap darurat dan 20% dari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai aspek pemulihan. Capaian program prioritas BPBD Kota Yogyakarta pada periode 2017 – 2021 adalah sebagai berikut:



## 2.5. Hambatan Utama Kinerja

Selama periode tahun 2017 – 2021, ada beberapa kendala dalam pelaksanaan kinerja BPBD Kota Yogyakarta, baik dalam pelaksanaan program eksternal maupun dalam manajemen internal BPBD Kota Yogyakarta, yaitu:

- Profesionalisme SDM dalam penanggulangan bencana.
- Dokumen KRB dan RPB Kota Yogyakarta belum ter update.
- Belum semua sarana dan prasarana peralatan kesiapsiagaan bencana di Kota Yogyakarta terpenuhi berdasarkan standar nasional, antara lain EWS untuk ancaman bencana gempa bumi dengan indeks risiko tinggi di Kota Yogyakarta menurut IRB 2020 belum terpasang.
- Pengelolaan database kebencanaan di Kota Yogyakarta masih bersifat manual dan sporadik yang belum terintegrasi lintas sektoral dalam satu sistem, terutama integrasi dengan database penduduk miskin dan rentan, termasuk pengelolaan logistik dan bantuan bencana kepada masyarakat.
- Dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dalam bentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana belum berjalan optimal, dimana dari 268 sekolah SD dan SMP yang ada di Kota Yogyakarta baru terbentuk 8 SPAB.
- Sinergisitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal.
- Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana terutama pada daerah rawan bencana belum sepenuhnya terlaksana;
- Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara kuantitas maupun kualitas;
- Belum memadainya kualitas ruang penyimpanan logistik dan peralatan kedaruratan bencana;
- Belum adanya standarisasi yang dituangkan dalam peraturan daerah mengenai besaran kompensasi yang diberikan atas kerusakan akibat bencana.

## **BAB III**

### **Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Yogyakarta diatur dalam Perwal Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021, dimana disebutkan bahwa tugas utama BPBD adalah membantu Walikota melaksanakan pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana. Dalam rangka pengoperasian tugas ini, disusun struktur pelaksana organisasi BPBD Kota Yogyakarta, terdiri dari Sekretariat dan Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data, Informasi, Komunikasi Kebencanaan dan Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam mendukung pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana.

Untuk melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPBD, dibutuhkan peyandingan antara Perwal Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana, yang dijabarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan**

SPM	PENYANDINGAN TUGAS DAN FUNGSI											
	SEKSI DATA, INFORMASI DAN KOMUNIKASI BENCANA			SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN			SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK		
	Perwal Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021	Sub Kegiatan dalam Keppmendagri 050-5889 Thn 2021	Permasalahan	Perwal Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021	Sub Kegiatan dalam Keppmendagri 050-5889 Thn 2021	Permasalahan	Perwal Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021	Sub Kegiatan dalam Keppmendagri 050-5889 Thn 2021	Permasalahan	Perwal Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021	Sub Kegiatan dalam Keppmendagri 050-5889 Thn 2021	Permasalahan
Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	penyiapan bahan dan analisa data potensi kebencanaan dan sumber daya penanggulangan bencana;	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Berakhirnya dokumen KRB dan RPB Kota Yogyakarta di tahun 2022, harus menjadi prioritas dalam rencana kegiatan di tahun anggaran 2022.	pelaksanaan pemetaan dan pengelolaan risiko bencana;	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Berakhirnya dokumen KRB dan RPB Kota Yogyakarta di tahun 2022, harus menjadi prioritas dalam rencana kegiatan di tahun anggaran 2022.	pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Belum adanya standarisasi yang dituangkan dalam peraturan daerah mengenai besaran kompensasi yang diberikan atas kerusakan akibat bencana.	pelaksanaan pengendalian operasional search and rescue dan evakuasi;	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Pengelolaan database kebencanaan di Kota Yogyakarta masih bersifat manual dan sporadik yang belum terintegrasi lintas sektoral dalam satu sistem, terutama integrasi dengan database penduduk miskin dan rentan, termasuk pengelolaan logistik dan bantuan bencana kepada masyarakat.

SPM	PENYANDINGAN TUGAS DAN FUNGSI											
	SEKSI DATA, INFORMASI DAN KOMUNIKASI BENCANA			SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAAN			SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK		
	Perwal Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021	Sub Kegiatan dalam Kepmendagri 050-5889 Thn 2021	Permasalahan	Perwal Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021	Sub Kegiatan dalam Kepmendagri 050-5889 Thn 2021	Permasalahan	Perwal Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021	Sub Kegiatan dalam Kepmendagri 050-5889 Thn 2021	Permasalahan	Perwal Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021	Sub Kegiatan dalam Kepmendagri 050-5889 Thn 2021	Permasalahan
Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	pelaksanaan pengelolaan sistem informasi Kebencanaan;	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Belum semua sarana dan prasarana peralatan kesiapsiagaan bencana di Kota Yogyakarta terpenuhi berdasarkan standar nasional, antara lain EWS untuk ancaman bencana gempa bumi dengan indeks risiko tinggi di Kota Yogyakarta menurut IRB 2020 belum terpasang.	pelaksanaan perencanaan penanggulangan bencana;	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dalam bentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana belum berjalan optimal, dimana dari 268 sekolah SD dan SMP yang ada di Kota Yogyakarta baru terbentuk 8 SPAB.	pelaksanaan pengkoordinasian dan fasilitasi rehabilitasi sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan;	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Profesionalisme SDM dalam penanggulangan bencana.		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara kuantitas maupun kualitas;
Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	pelaksanaan fasilitasi pusat komunikasi Kebencanaan;	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara kuantitas maupun kualitas;	pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kebencanaan;	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Sinergisitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal;	pelaksanaan pengkoordinasian dan fasilitasi normalisasi kondisi fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;		pelaksanaan pengendalian operasional respon cepat penanganan Kejadian Luar Biasa Penyakit dan bencana;	Penyusunan Rencana Kontijensi	Belum memadainya kualitas ruang penyimpanan logistik dan peralatan kedaruratan bencana;	
Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana			Pengelolaan database kebencanaan di Kota Yogyakarta masih bersifat manual dan sporadik yang belum terintegrasi lintas sektoral dalam satu	pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana;	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana terutama pada daerah rawan bencana belum sepenuhnya terlaksana;	pelaksanaan pengkoordinasian dan fasilitasi rekonstruksi fisik pasca bencana;			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Profesionalisme SDM dalam penanggulangan bencana.	

SPM	PENYANDINGAN TUGAS DAN FUNGSI											
	SEKSI DATA, INFORMASI DAN KOMUNIKASI BENCANA			SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN			SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK		
	Perwal Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021	Sub Kegiatan dalam Kepmendagri 050-5889 Thn 2021	Permasalahan	Perwal Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021	Sub Kegiatan dalam Kepmendagri 050-5889 Thn 2021	Permasalahan	Perwal Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021	Sub Kegiatan dalam Kepmendagri 050-5889 Thn 2021	Permasalahan	Perwal Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021	Sub Kegiatan dalam Kepmendagri 050-5889 Thn 2021	Permasalahan
			sistem, terutama integrasi dnegan database penduduk miskin dan rentan, termasuk pengelolaan logistik dan bantuan bencana kepada masyarakat.									
Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana			Profesionalisme SDM dalam penanggulangan bencana.		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Profesionalisme SDM dalam penanggulangan bencana.						Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				pelaksanaan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan							Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					pelaksanaan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat bencana;		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
Pendataan terhadap warga yang				pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar lembaga dan	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam					pelaksanaan pengelolaan logistik dan peralatan		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi

SPM	PENYANDINGAN TUGAS DAN FUNGSI											
	SEKSI DATA, INFORMASI DAN KOMUNIKASI BENCANA			SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN			SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK		
	Perwal Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021	Sub Kegiatan dalam Keppmendagri 050-5889 Thn 2021	Permasalahan	Perwal Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021	Sub Kegiatan dalam Keppmendagri 050-5889 Thn 2021	Permasalahan	Perwal Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021	Sub Kegiatan dalam Keppmendagri 050-5889 Thn 2021	Permasalahan	Perwal Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021	Sub Kegiatan dalam Keppmendagri 050-5889 Thn 2021	Permasalahan
terkena/menjadi korban bencana				kemitraan dalam penanggulangan bencana;	Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					penanggulangan bencana;	Korban Bencana Kabupaten/Kota	
Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana					Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota					pelaksanaan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana;		
Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana										pelaksanaan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana;	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana										pelaksanaan pengelolaan layanan mobil jenazah;		
Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas												

### 3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tabel identifikasi permasalahan diatas, dapat ditarik beberapa isu-isu strategis pelayanan BPBD Kota Yogyakarta, yaitu:

- Pengelolaan dan pemanfaatan data belum berorientasi pada perkembangan IT;
- Belum ada kajian yang komprehensif terkait pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana di Kota Yogyakarta yang meliputi seluruh aspek ipoleksosbudhankam;
- Pemetaan dan pengelolaan risiko bencana masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya tersistem dalam standar baku yang terukur dan terkoneksi secara lintas program;
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kota (Per Jenis Bencana) belum terlaksanan secara masif dan berkelanjutan;
- Kemandirian kawasan/komunitas dalam pelaksanaan tangguh bencana;
- Belum tersusun regulasi Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta yang sistematis dan komprehensif;
- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana belum terbakukan; dan
- Penyediaan dan pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan kedaruratan bencana belum seluruhnya memenuhi standar nasional

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

Sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026, prioritas, misi dan sasaran Kota Yogyakarta yang didukung oleh BPBD adalah sebagai berikut:

OPD	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA	MISI KOTA YOGYAKARTA	SASARAN KOTA YOGYAKARTA	SASARAN BPBD KOTA YOGYAKARTA
BPBD Kota Yogyakarta	Utama: Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Utama: Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas	Utama: Meningkatnya Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
	Pendukung: Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pendukung: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum	Pendukung: Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

## BAB V

### Strategi dan Arah Kebijakan

#### 5.1. Strategi

Menindaklanjuti isu-isu strategis BPBD Kota Yogyakarta yang termuat dalam BAB III dan untuk mendukung sasaran Kota Yogyakarta dalam Meningkatnya Infrastruktur Wilayah, BPBD Kota Yogyakarta menerapkan beberapa strategi sebagai berikut:

- ✚ Pengelolaan dan pemanfaatan data berorientasi pada perkembangan IT;
- ✚ Menyusun kajian komprehensif risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang meliputi aspek pencegahan dan mitigasi, aspek kesiapsiagaan, aspek tanggap darurat dan aspek pemulihan dengan mempertimbangkan ipoleksosbudhankam Kota Yogyakarta dan terkoneksi secara lintas sektoral dan program;
- ✚ Menyusun dan melaksanakan metode Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) secara masif dan berkelanjutan;
- ✚ Mendorong kemandirian kawasan/komunitas dalam pelaksanaan tangguh bencana; dan
- ✚ Menyusun regulasi Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta yang sistematis dan komprehensif.

Selain sebagai salah satu OPD pendukung utama dalam mewujudkan sasaran Kota Yogyakarta, berupa Meningkatnya Infrastruktur Wilayah, BPBD juga sebagai OPD penunjang pelaksanaan sasaran Kota Yogyakarta berupa Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan, dengan kinerja berupa Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### 5.2. Arah Kebijakan

Strategi diatas kemudian diimplementasikan menjadi arah kebijakan BPBD Kota Yogyakarta dalam bentuk kinerja berupa:

Kinerja	Indikator Kinerja	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	92,90	87,33	88,91	90,50	91,55
Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	50	55	60	65	70

## **BAB VI**

### **Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Untuk mewujudkan strategi dan sasaran BPBD Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026 disusun rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BPBD tahun 2023 – 2026, sebagai berikut:

Program	Nama Jabatan Eselon 3	Eselon 3		Target					Pagu Eselon 3 Per Indikator Kinerja					Kegiatan	Nama Jabatan Eselon 4 / Sub Koordinator Pelaksana Kinerja	Eselon 4 / Sub Koordinator		Target					Pagu Eselon 4 / Sub Koordinator Per Indikator Kinerja				
		Kinerja	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026			Kinerja	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN KESIAPSIAGAAN DAN DATA INFORMASI KOMUNIKASI KEBENCANAAN	Meningkatkan kesiapsiagaan atas bencana	Presentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana		74,65%	77,82%	80,99%	83,09%	3.212.145,045	3.212.145,045	3.212.145,045	3.212.145,045	3.212.145,045	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Melaksanakan penguatan kapasitas kawasan tangguh bencana	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	15 kawasan (15 KTB)	23 kawasan (15 KTB + 8 SPAB)	23 kawasan (15 KTB + 8 SPAB)	20 kawasan (20 SPAB)	20 kawasan (20 SPAB)	1.604.723,455	1.604.723,455	1.604.723,455	1.604.723,455	1.604.723,455
														KEPALA SEKSI DATA INFORMASI KOMUNIKASI KEBENCANAAN	Menyediakan informasi rawan bencana	Jumlah dokumen informasi rawan bencana		6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	1.607.421,590	1.607.421,590	1.607.421,590	1.607.421,590	1.607.421,590	
	KEPALA BIDANG KEDARURATAN LOGISTIK DAN REHABILITASI REKONSTRUKSI	Meningkatkan penanganan kedaruratan dan pasca bencana	Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	4.417.838,717	4.417.838,717	4.417.838,717	4.417.838,717	4.417.838,717	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	KEPALA SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi	-	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	3.415.552,317	3.415.552,317	3.415.552,317	3.415.552,317	3.415.552,317
															Melaksanakan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	1.002.286,400	1.002.286,400	1.002.286,400	1.002.286,400	1.002.286,400	

Program	Nama Jabatan Eselon 3	Eselon 3		Target					Pagu Eselon 3 Per Indikator Kinerja					Kegiatan	Nama Jabatan Eselon 4 / Sub Koordinator Pelaksana Kinerja	Eselon 4 / Sub Koordinator		Target					Pagu Eselon 4 / Sub Koordinator Per Indikator Kinerja				
		Kinerja	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026			Kinerja	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
			Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	494.744.540	494.744.540	494.744.540	494.744.540	494.744.540	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN KONSTRUKSI	Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial TRC tingkat kota dalam melaksanakan penanganan awal darurat bencana	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	40 Orang	34.191.500	34.191.500	34.191.500	34.191.500	34.191.500				
														Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Melaksanakan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah laporan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	-	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	460.553.040	460.553.040	460.553.040	460.553.040	460.553.040
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	SEKRETARIS BADAN	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	4.882.775.556	4.882.775.556	4.882.775.556	4.882.775.556	4.882.775.556	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPBD dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPBD	46 dokumen	263.653.040	263.653.040	263.653.040	263.653.040	263.653.040				
														Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Melaksanakan administrasi keuangan BPBD dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi keuangan BPBD	56 laporan	3.479.953.000	3.479.953.000	3.479.953.000	3.479.953.000	3.479.953.000				
														Administrasi Umum Perangkat Daerah	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Melaksanakan administrasi umum BPBD dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi umum BPBD	6 laporan	275.365.556	275.365.556	275.365.556	275.365.556	275.365.556				



## BAB VII

### Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu indikator: Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.1. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Meningkat	Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	(50% kampung tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi dan rekonstruksi) dikali 100

Kinerja sasaran Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Meningkat dengan indikator Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 7.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	84,02%	88,46%	88,46%	100%	92,90%	100%

Dengan capaian kinerja dari tahun 2017 – 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 7.1. Capaian Indikator Sasaran BPBD Tahun 2017-2021**



Selain capaian indikator sasaran, kinerja BPBD juga dapat dibandingkan melalui capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana pada tahun 2021, capaian SPM sub urusan Bencana BPBD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

**Data 7.1. Capaian Standar Pelayanan Minimal/Indikator Kinerja Kunci Outcome Sub Urusan Bencana Tahun 2021**

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2021				
		Target Nasional	Realisasi BPBD Kota Yogyakarta			Data Dukung
			Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian = (5):(4)X 100%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	459.429	459.429	100%	Diambil dari akumulasi data: - Jumlah penduduk di Kawasan Kampung Tangguh Bencana (KTB) = 318.272 jiwa - Jumlah warga dan aparatur yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana = 478 orang - Jumlah pengunjung website, social media dan YouTube BPBD = 140.679 orang
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	318.750	318.750	100%	Diambil dari akumulasi data: - Jumlah penduduk KTB yang mendapatkan manfaat dari sarana dan prasarana KTB (berupa sepeda motor roda 3, chainsaw, genset, pompa air, HT 1, long spinal board dan vertical rescue) = 318.272 jiwa - Jumlah warga dan aparatur yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana = 478 orang
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	1.471	1.471	100%	Diambil dari akumulasi data: - Jumlah korban terdampak bencana alam yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi = 255 orang - Jumlah pemulian jenazah prokes Covid-19 yang dilaksanakan BPBD = 1.216 pemulian jenazah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang diturunkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2019 tentang Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja outcome yang mengukur keberhasilan pelayan kebencanaan di Kota Yogyakarta. Dari ketiga indikator kinerja outcome tersebut, capaian kinerja BPBD Kota Yogyakarta seluruhnya mencapai 100% dengan predikat sangat baik.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 serta isu-isu sub urusan bencana yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 ini telah memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya visi, misi dan tujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta untuk jangka waktu Tahun 2023-2026. Untuk selanjutnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 Kota Yogyakarta ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di dalamnya. Pengukuran tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaannya, secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Pada akhirnya dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta untuk tahun 2023 - 2026 akan tercapai, serta dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.